

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : - - 2020

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PAPAR
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Papar Tahun 2021 telah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya.

Dalam penyusunan perencanaan Renja, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi instansi dalam menyesuaikan Rencana Kerja organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* Kecamatan Papar.

Renja Kecamatan Papar Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Papar Tahun 2021 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Papar dalam upaya mewujudkan mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini.

Kediri, - - 2020
CAMAT PAPAR

Drs. PURWIAJI, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19631005 198303 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD.....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	38
PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan sebagai salah satu SKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berkewajiban membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kecamatan Papar adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Rancangan Awal renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Papar disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Papar Tahun 2021
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Papar pada Tahun 2021
3. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja ini adalah :

1. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Papar Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Papar.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
4. Tersusunnya kegiatan Kecamatan Papar Tahun Anggaran 2021 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Selain itu, tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Papar adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Papar. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Papar adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Papar dalam turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahun 2021, Kecamatan Papar menggunakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020) yang mengacu pada APBD Tahun 2020. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Papar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Papar tahun-tahun sebelumnya (2016 - 2021). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Papar tahun lalu dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Papar dan/atau realisasi APBD Kecamatan Papar sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2020
Kabupaten Kediri**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)			
5	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%				
5	2	01	30	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	656 dok	266 dok.	130 dok	130 Dok	100%	36 dok	432 dok	65,85%
			31	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	1.302 Keg.	723 Keg.	193 Keg.	193 Keg.	100%	172 Keg.	1.088 keg.	83,56%
5	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%				
5	2	02	55	Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	107 unit	48 unit	26 unit	26 Unit	100%	17 unit	91 unit	85,05%
5	2	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%				
5	2	06	21	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	15 dok	5 dok	4 dok	4 Dok	100%	3 dok	12 dok	80%

Rencana Kerja Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)			
5	2	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<i>Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	15	16	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	1.071 Keg.	414 keg	219 Keg.	219 Keg.	100%	253 Keg.	886 keg	82,73%
5	2	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<i>Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	10 Keg.	4 keg	2 keg	2 keg	100%	1 Keg.	7 keg.	70%
5	2	20		Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	<i>Persentase Tp PKK desa yang terbina</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	20	09	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	26 Keg	10 keg	6 keg	6 keg	100%	1 Keg.	17 keg	60,71%
5	2	21		Program perencanaan pembangunan daerah	<i>Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	21	47	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	31 keg	12 keg	11 keg	11 keg	100%	1 keg	24 keg	77,42%
5	2	23		Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	23	08	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	75 Keg	40 keg	4 keg	4 keg	100%	4 Keg.	48 keg	64.%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka capaian kinerja Kecamatan Papar adalah lebih dari 95% untuk semua program dan kegiatan di tahun 2018 dan 2019.

Kecamatan Papar menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tingkat kepuasan masyarakat untuk pelayanan tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan proses cetak E-KTP baik dari prosedur maupun waktunya yang relatif lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya.
2. Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan masih di bawah target karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai standar pelaporan yang ditetapkan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa juga masih belum menunjukkan hasil yang maksimal meskipun program dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini sudah dilaksanakan secara intensif. Terbatasnya SDM Pengelolaan Keuangan Desa yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan menjadi sebab utama masih sedikitnya jumlah desa yang mampu menyusun laporan tersebut.

Namun demikian berbagai upaya tetap dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab belum tercapainya target kinerja :

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang masalah pencetakan e-KTP dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk semua jenis pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat.
3. Pendelegasian tugas lebih diintensifkan sesuai dengan TUPOKSI masing-masing jabatan sehingga tidak terjadi penumpukan tugas di salah satu personal.
4. Meningkatkan kualitas kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan mengadakan monitoring ke desa, asistensi di kecamatan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan desa.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Papar dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Konflik Berlatar Belakang Agama dan Sosial yang dilaporkan dan terfasilitasi. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya survey IKM adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pemerintah Kecamatan Papar dalam melayani surat menyurat atau pelayanan masyarakat lainnya. Survey IKM di Kecamatan Papar yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 82,25 dan 82,75 pada tahun 2019. Berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2004, tanggal 24 Pebruari 2004, Kecamatan Papar memiliki nilai indek dengan Mutu Pelayanan **C**, yang berarti bahwa Kinerja Unit Pelayanan masih perlu diperbaiki lagi. Kecamatan Papar akan tetap berupaya meningkatkan Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat hingga tercapai mutu pelayanan yang baik.

Adapun untuk penanganan konflik berlatar belakang agama dan sosial, sudah dapat dilakukan dengan baik. Situasi kondusif ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antar pihak yang berwenang dan masyarakat.

Hasil Survey IKM dilakukan setiap tahun dan telah dikirim ke Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri dan untuk laporan penanganan konflik di wilayah telah dikirim ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Papar selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan		Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	82,25	82,50	82,75	83	82,25	82,75	-	83	untuk tahun 2020 realisasi capaian nilai IKM belum ada karena survey belum dilakukan
2	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi		Jumlah konflik yang diselesaikan dibanding Jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	-	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Papar mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 1, yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Papar. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Papar. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Papar terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
 - a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani sejumlah konflik yang ada di wilayah.
 - b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
 - c. Masih kurangnya kinerja aparat pemerintah desa
 - d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
2. Fungsi Pelayanan Publik
 - a. Capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Papar menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan

- b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instansi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Papar agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP dan Adminduk lainnya
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk usulan hasil RKPD Tahun 2021 disampaikan pada tahun n-1 (2020) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Papar. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD Kecamatan Papar Tahun 2016–2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra SKPD Kecamatan Papar Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kediri

SKPD : Kecamatan Papar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Cat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Urusan	Kec. Papar				Non Urusan	Kec. Papar				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen rensta dan renja</i>	<i>3 dok</i>	<i>500.000</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen rensta dan renja</i>	<i>3 dok</i>	<i>500.000</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah RKA</i>	<i>38 dok</i>	<i>250.000</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah RKA</i>	<i>38 dok</i>	<i>250.000</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah RKA - P</i>	<i>1 dok</i>	<i>250.000</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah RKA - P</i>	<i>1 dok</i>	<i>250.000</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Jumlah laporan realisasi</i>	<i>2 dok</i>	<i>550.000</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Jumlah laporan realisasi</i>	<i>2 dok</i>	<i>550.000</i>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan			
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Pembayaran Belanja Pegawai Yang Dilaksanakan</i>	<i>26 keg</i>	<i>2.420.838.894</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Pembayaran Belanja Pegawai Yang Dilaksanakan</i>	<i>26 keg</i>	<i>2.420.838.894</i>	

Rencana Kerja Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri Tahun 2021

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	262 keg	36.484.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	262 keg	36.484.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	2 orgng	17.380.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Pajak Kendaraan	2 orgng	17.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	12 dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	12 dok	1.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum / barang			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum / barang			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Pengelola Administrasi Barang	2 orgng	13.300.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Pengelola Administrasi Barang	2 orgng	13.300.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum / barang cetakan			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum / barang cetakan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dilaksanakan	4 keg	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dilaksanakan	4 keg	2.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dilaksanakan	12 keg	2.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dilaksanakan	12 keg	2.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 keg	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 keg	1.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana	18 keg	10.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana	18 keg	10.800.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Arsip Yang Tersusun	12 dok	2.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Arsip Yang Tersusun	12 dok	2.500.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		
	<i>Pengadaan peralatan dan mesin</i>		<i>Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin</i>	<i>1 unit</i>	<i>4.884.550</i>	<i>Pengadaan peralatan dan mesin</i>		<i>Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin</i>	<i>1 unit</i>	<i>4.884.550</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum		
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10.112.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10.112.000</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Tenaga Kebersihan</i>	<i>38 org</i>	<i>2.000.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Tenaga Kebersihan</i>	<i>38 org</i>	<i>2.000.000</i>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan</i>	<i>11 unit</i>	<i>6.350.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan</i>	<i>11 unit</i>	<i>6.350.000</i>
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Yang Terlaksana</i>	<i>2 keg</i>	<i>1.000.000</i>	<i>Pemeliharaan Mebel</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Yang Terlaksana</i>	<i>2 keg</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin</i>	<i>10 unit</i>	<i>2.000.000</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin</i>	<i>10 unit</i>	<i>2.000.000</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terlaksana</i>	<i>1 keg</i>	<i>21.991.900</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terlaksana</i>	<i>1 keg</i>	<i>21.991.900</i>

2	Unsur Kewilyahan	Kec. Papar				Unsur Kewilyahan	Kec. Papar				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>6 keg</i>	<i>7.290.000</i>	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>6 keg</i>	<i>7.290.000</i>	
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>6 keg</i>	<i>1.700.000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>6 keg</i>	<i>1.700.000</i>	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat</i>	<i>3 lprn</i>	<i>2.000.000</i>	<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat</i>	<i>3 lprn</i>	<i>2.000.000</i>	
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 keg</i>	<i>3.500.000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 keg</i>	<i>3.500.000</i>	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
	<i>Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	<i>4 keg</i>	<i>7.100.000</i>	<i>Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	<i>4 keg</i>	<i>7.100.000</i>	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</i>	<i>1 keg</i>	<i>3.400.000</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</i>	<i>1 keg</i>	<i>3.400.000</i>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa</i>		<i>Jumlah Partisipasi Desa Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</i>	<i>1 keg</i>	<i>6.533.000</i>	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa</i>		<i>Jumlah Partisipasi Desa Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</i>	<i>1 keg</i>	<i>6.533.000</i>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>4 keg</i>	<i>3.050.000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>4 keg</i>	<i>3.050.000</i>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	<i>12 ke</i>	<i>8.400.000</i>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	<i>12 keg</i>	<i>8.400.000</i>
	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>		<i>Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>6 keg</i>	<i>5.500.000</i>	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>		<i>Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>6 keg</i>	<i>5.500000</i>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		

	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>1 keg</i>	<i>37.824.000</i>	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>1 keg</i>	<i>37.824.000</i>	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan</i>	<i>4 keg</i>	<i>6.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		<i>Jumlah Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan</i>	<i>4 keg</i>	<i>6.000.000</i>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>6.850.000</i>	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>6.850.000</i>	
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>6.130.000</i>	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>6.130.000</i>	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>8.700.000</i>	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>6 keg</i>	<i>8.700.000</i>	

Rencana Kerja Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri Tahun 2021

	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>1 keg</i>	<i>37.974.000</i>	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>1 keg</i>	<i>37.974.000</i>	
	JUMLAH				2.710.692.344					2.710.692.344	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Papar memiliki peran penting untuk mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk setiap usulan dan kegiatan masyarakat selalu ditampung dan dilihat mana yang lebih penting melalui kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, untuk diteruskan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Papar yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah di tingkat desa dan kecamatan, LSM dan kelompok masyarakat telah menghasilkan usulan prioritas program dan kegiatan masyarakat, seperti yang disajikan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kecamatan Papar - Kabupaten Kediri

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Bidang Prasarana Wilayah				
1	Pembangunan jalan makadam menjadi hotmix	Ds. Peh Kulon	Pembangunan Kapasitas Jalan	4500 meter ²	
2	Penahan badan jalan	Ds. Ngampel	Pembangunan kapasitas badan jalan	210 m ²	
3	Peningkatan jalan aspal	Desa Srikaton – Desa Kepuh	Meningkatkan Kapasitas Jalan	3000 meter ²	
II	Bidang Ekonomi				
1	Pelatihan bengkel las	Lokasi Desa Peh Wetan	Peningkatan ketrampilan masyarakat	1 paket	
2	Pelatihan penanganan limbah krupuk sadriyah	Lokasi Desa Puhjajar	Mengurangi dampak pencemaran lingkungan	1 paket	
3	Pelatihan manik manik	Lokasi Desa Ngampel	Meningkatkan ketrampilan masyarakat	1 paket	
III	Bidang Sosial Budaya-Kemasyarakatan				
1	Penguatan kelembagaan karang taruna	Desa Kepuh	Meningkatkan ketrampilan karang taruna	1 paket	
2	Pelatihan budaya anngrek	Desa Kedungmalang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat	1 paket	
3	Rehab rumah tidak layak huni	Desa Ngampel	Jumlah rumah yg di rehab	25 rumah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. TUJUAN

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Papar mempunyai tujuan strategis, yaitu ***“Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga Tercipta Suasana Kehidupan Yang Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik”***

B. SASARAN

Sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Papar adalah ***“Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis dan saling***

menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.”

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan isu-isu strategis dan arah yang telah dirumuskan, Kecamatan Papar menetapkan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - b. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - c. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - d. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - b. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - c. *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - d. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - e. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - b. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - c. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
 - d. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - e. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - f. *Pengadaan peralatan dan mesin*
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - b. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - b. *Pemeliharaan Mebel*
 - c. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - d. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*
 - b. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
- 8) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - a. *Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan*
 - b. *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
- 9) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. *Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*
- 10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan*
- 11) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa*
- 12) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
- 13) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*
 - b. *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*
- 14) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. *Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- 15) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- a. *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan*
- 16) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- a. *Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*
 - b. *Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*
 - c. *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - d. *Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*

Dari program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2021 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Papar dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 2.710.692.344,-

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam format table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kediri

SKPD : Kecamatan Papar

RENCANA TAHUN 2021 PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										Rencana Tahun 2022		
Kode	Urusan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (RP)	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
X.XX.1.201.1	Non Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rensta dan renja	Papar	3	dok	500.000	DAU	500.000	DAU
X.XX.1.201.1	Non Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	Papar	38	ddk	250.000	DAU	250.000	DAU
X.XX.1.201.1	Non Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA - P	Papar	1	dok	250.000	DAU	250.000	DAU
X.XX.1.201.6	Non Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan realisasi	Papar	2	dok	550.000	DAU	550.000	DAU
X.XX.1.202.1	Non Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Belanja Pegawai Yang Dilaksanakan	Papar	26	keg	2.420.833.894	DAU	2.420.833.894	DAU

X.XX.1.202.2	Non Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	Papar	262	keg	36.484.000	DAU	36.484.000	DAU
X.XX.1.202.3	Non Urusan	Administrasi Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	Papar	12	dok	17.380.000	DAU	17.380.000	DAU
X.XX.1.202.5	Non Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Papar	1	dok	250.000	DAU	250.000	DAU
X.XX.1.202.7	Non Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Papar	1	dok	1.000.000	DAU	1.000.000	DAU
X.XX.1.203.6	Non Urusan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum / barang	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Barang	Papar	12	dok	13.300.000	DAU	13.300.000	DAU
X.XX.1.209.6	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum / komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dilaksanakan	Papar	4	keg	2.000.000	DAU	2.000.000	DAU

X.XX.1.206.5	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum / barang cetakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dilaksanakan	Papar	12	keg	2.000.000	DAU	2.000.000	DAU
X.XX.1.209.6	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Papar	12	keg	1.800.000	DAU	1.800.000	DAU
X.XX.02.306.09	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana	Papar	18	keg	10.800.000	DAU	10.800.000	DAU
X.XX.1.206.10	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip Yang Tersusun	Papar	12	dok	2.500.000	DAU	2.500.000	DAU
X.XX.1.206.6	Non Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Pengadaan elektrit generatingset	Jumlah Pengadaan elektrit generator set	Papar	1	unit	4.884.550	DAU	4.884.550	DAU
X.XX.1.208.2	Non Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan	Papar	12	bln	10.112.000	DAU	10.112.000	DAU
X.XX.1.208.4	Non Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Papar	38	keg	2.000.000	DAU	2.000.000	DAU
X.XX.1.209.1	Non Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajak Kendaraan	Papar	11	Unit	6.350.000	DAU	6.350.000	DAU

X.XX.1.209.5	Non Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Yang Terlaksana	Papar	2	keg	1.000.000	DAU	1.000.000	DAU
X.XX.1.209.6	Non Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Papar	10	unit	2.000.000	DAU	2.000.000	DAU
X.XX.1.209.9	Non Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terlaksana	Papar	1	keg	21.991.900	DAU	21.991.900	DAU
7.1.2.201.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Papar	6	keg	7.290.000	DAU	7.290.000	DAU
7.1.2.201.2	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Papar	6	keg	1.700.000	DAU	1.700.000	DAU
7.1.2.202.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Papar	3	lprn	2.000.000	DAU	2.000.000	DAU

7.1.2.202.3	UNSUR KEWILAYAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Papar	6	keg	3.500.000	DAU	3.500.000	DAU
7.1.2.203.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Papar	4	keg	7.100.000	DAU	7.100.000	DAU
7.1.2.204.3	UNSUR KEWILAYAHAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Papar	1	keg	3.400.000	DAU	3.400.000	DAU
7.1.2.201.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Partisipasi Desa Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Papar	1	keg	6.533.000	DAU	6.533.000	DAU
7.1.3.201.3	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Papar	4	keg	3.050.000	DAU	3.050.000	DAU
7.1.4.201.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Papar	12	keg	8.400.000	DAU	8.400.000	DAU

				Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama							
7.1.4.201.2	UNSUR KEWILAYAHAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Papar	6	keg	5.500.000	DAU	5.500.000	DAU
7.1.5.201.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Papar	1	keg	37.824.000	DAU	37.824.000	DAU
7.1.5.201.8	UNSUR KEWILAYAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan	Papar	4	keg	6.000.000	DAU	6.000.000	DAU
7.1.6.201.1	UNSUR KEWILAYAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Papar	6	keg	6.850.000	DAU	6.850.000	DAU
7.1.6.201.2	UNSUR KEWILAYAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Papar	6	keg	6.130.000	DAU	6.130.000	DAU

*Rencana Kerja Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri Tahun 2021*

7.1.6.201.3	UNSUR KEWILAYAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Papar	8	Keg	8.700.000	DAU	8.700.000	DAU
7.1.6.201.12	UNSUR KEWILAYAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Papar	8	Keg	37.974.000	DAU	37.974.000	DAU
									2.710.692.344		2.710.692.344	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Kecamatan Papar Tahun 2021:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1	Non Urusan		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		250.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		250.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		550.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.420.838.894
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		36.484.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	17.380.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		250.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum / barang	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Barang	13.300.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dilaksanakan	2.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dilaksanakan	2.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana	10.800.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	

	Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah Pengadaan eletrit generating set	4.884.550
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan	10.112.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	2.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum / Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.350.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Yang Terlaksana	1.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	2.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terlaksana	21.991.900.000
2	Unsur Kewilayahan		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.290.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.700.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.500.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3.400.000

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Partisipasi Desa Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6.533.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.050.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.400.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37.824.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan	6.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.850.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.130.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.700.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	37.974.000
	JUMLAH		2.710.692.344

BAB V PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Papar Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan Urusan Pemerintahan (Unsur Penunjang) bidang pemerintahan (Fungsi Penunjang Lainnya) Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioparasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program / kegiatan Kecamatan Papar dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2020
CAMAT PAPAR

Drs. PURWIAJI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP 19631005 198303 1 015